

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA DENPASAR

N.L Supadmi¹⁾, D.G Dharma Suputra²⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana^{1,2)}

ABSTRACT

This study aims to determine the capacity of human resources, clarity of budget targets, and financial reporting system effects on accountability. The main issues in this research are "The influence of human resources capacity, clarity of budget targets, and village financial reporting system on accountability of village fund management in Denpasar city". The population in this study is the existing village in the city of Denpasar as many as 27 villages. The method of determining the sample is done by purposive sampling. Villages that meet the sample criteria are the villages located in the subdistricts of North Denpasar and West Denpasar as many as 16 villages with 60 respondents. Data collection was done by survey and interview method using questionnaire. Data analysis techniques use multiple linear regression.

Based on research results of human resource capacity, clarity of budget target, financial reporting system have a positive and significant influence on accountability of village fund management in Denpasar City.

Keywords: Human Resource Capacity, Clarity of Budget Objectives, Reporting System, Accountability, Village Fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pengaruhnya pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar".

Populasi dalam penelitian ini adalah desa yang ada di kota Denpasar sebanyak 27 desa. Metode penentuan sampel *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Desa yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah desa di kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat yaitu sebanyak 16 Desa dengan responden sebanyak 60. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar.

Kata Kunci: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Percepatan dan pemerataan pembangunan pedesaan menjadi kebutuhan dan keharusan bagi masyarakat Indonesia. Desa membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Dana desa bersumber dari; Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan

Pendapatan lain-lain (hibah dan lain-lain pendapatan desa yang sah). Pemerintah Desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa secara transparan dan Akuntabel. Kepemilikan dan pengelolaan dana yang cukup besar akan memicu munculnya dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi seperti kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan dana, kesalahan prosedur dan administrasi yang menimpa aparat desa. Hal tersebut terjadi karena kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki aparatur desa dan pemahaman sistem pelaporan keuangan desa yang masih rendah serta tidak ada kejelasan sasaran anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengemukakan potensi persoalan yang muncul dari aspek sumber daya manusia adalah tenaga pendamping desa berpotensi melakukan *fraud* dengan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki aparat desa. Aspek lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah aspek tata laksana yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat aparatur desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu satu tahun. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran, sehingga aparatur desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

Akuntabilitas dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki aparatur desa mengenai sistem penganggaran, sistem pelaporan keuangan desa yang baik untuk dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Aparatur desa sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menemukan, Susilowati (2014) menyatakan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun hal berbeda dinyatakan oleh Wahyuni (2014) yang menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik dinilai dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dari pengelolaan dana desa, peneliti ingin meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Alasan pemilihan kota Denpasar sebagai lokasi penelitian adalah karena kota Denpasar pada tahun anggaran 2015 dan 2016 mendapat dana desa yang besar, dan menurut berita di Koran Radar Bali Senin 10 Agustus 2015 "Desa Bingung Kelola Dana Besar". Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para perangkat desa di tingkat pemerintahan desa untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apakah kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan melakukan pengujian secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan suatu organisasi. Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen bekerja untuk membangun kepuasan guna mencapai kesuksesan tertinggi organisasi. Pemerintah selaku *steward* yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dan

rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Teori *Stewardship* merupakan gambaran mengenai penatalayanan kaitannya terhadap organisasi didalam pemerintahan.

Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas publik terkait dengan kewajiban untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012). Kapasitas sumber daya manusia diukur dengan indikator pendidikan, tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman.

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi, agar anggaran dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis:1979). Menurut Mulyadi (2001:646) beberapa penyebab individu tidak mampu dan tidak mau mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah:

1. Ketidaksesuaian tujuan individu dengan tujuan organisasi
2. Ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi melalui perilaku yang diharapkan.

Sistem pelaporan keuangan merupakan suatu alur yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (*Accrual Base*), pelaporan keuangan berdasarkan akrual basis artinya penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan).

Pengertian Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Dana Desa adalah Anggaran yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa dan desa adat ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk; penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pembinaan kemasayarakatan.

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012). Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka *output* atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar

Menurut Kenis (1979), Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa, maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Susilowati (2014) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Surakarta. Sebelumnya, Anjarwati (2012) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar

Menurut Kusumaningrum (2013), terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. Manajerial berarti menyediakan suatu informasi keuangan yang bermanfaat sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan serta dapat memudahkan pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sistem pelaporan merupakan suatu alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari pimpinan suatu unit pemerintahan (Kepala Desa) kepada kepala pemerintahan (Kepala Daerah).

Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintahan Desa di Kota Denpasar, yaitu Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2009:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kapasitas sumber daya manusia (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), sistem pelaporan keuangan desa (X3).
- 2) Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Skala pengukuran yang digunakan untuk setiap indikator variabel adalah skala *likert* modifikasi, yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai 4 poin untuk skor tertinggi dan nilai 1 untuk skor terendah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sifatnya adalah sebagai berikut.

- a) Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2009:14). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data instrumen penelitian.
- b) Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2009:14). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah desa di Kota Denpasar.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik individu maupun kelompok yang meliputi: hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari pengisian kuesioner oleh responden.
- b) Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau mempergunakan sumber lain, seperti jumlah desa di kota Denpasar.

Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah desa yang ada di kota Denpasar sebanyak 27 desa dari empat kecamatan. Sampel dapat diartikan sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiyono, 2014: 116). Sampel penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Desa yang berada di Kota Denpasar
- 2) Desa yang menerima dana desa
- 3) Perangkat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak dan mendapat dana desa terbesar.

Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi syarat sebagai sampel adalah kecamatan Denpasar Utara dan kecamatan Denpasar Barat yang masing-masing memiliki 8 desa dan sebagai penerima dana desa terbesar di Kota Denpasar. Jadi jumlah sampel 16 desa dengan jumlah responden 64 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu kepala desa, sekretaris desa, Kaur keuangan dan Kaur perencanaan.
- 2) Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis langsung kepada responden penelitian.

1. Uji Kualitas Data

Pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kuesioner sebagai instrumen penelitian harus diuji keandalan dan keabsahannya terlebih dahulu seperti berikut.

- 1) Uji Validitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson*. Menurut Ghazali (2009:47) suatu variabel dikatakan valid apabila nilai korelasi pearson lebih besar dari 0,50 dan nilai signifikansi lebih kecil dari alpha yang ditentukan. Dalam penelitian ini nilai alpha sebesar 0,05, karena dianggap cukup signifikan.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's alpha*. Koefisien *Cronbach's alpha* yang lebih dari 0,6 disebut reliabel. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, *Cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi reliabilitasnya.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) dengan kriteria menurut Santoso (2000: 218), yaitu:

- a. Jika angka *tolerance* di atas 0,10 dan $VIF > 10$ dikatakan terdapat gejala multikolinearitas.
- b. Jika angka *tolerance* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dengan uji Glejser, heteroskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari besar 0,05. Sementara homoskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

3. Pengujian Kelayakan Model, Koefisien Determinasi dan Hipotesis

1) Uji kelayakan model (uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian layak digunakan. Apabila hasil uji F menyatakan signifikan atau probabilitas $value \leq 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian layak digunakan. Artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali (2011:98)).

2) Koefisien Determinasi ($Adj R^2$)

Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian variabel terikatnya dilihat dari *adjusted R²*-nya. Pemilihan nilai *adjusted R²* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi bervariasi antara 1 (satu) dan 0 (nol). Apabila $R^2 = 1$, berarti 100 persen total variasi variabel terikat dapat dijelaskan variabel bebasnya. Namun bila nilai $R^2 = 0$, berarti tidak ada

total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya (Wirawan, 2014:244).

3) Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf nyata atau alpha (α) yang digunakan adalah 5 persen (0,05). Apabila signifikansi t lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$, maka H_1 diterima artinya ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen (Ghozali (2011:98).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif, seperti rerata (*mean*), nilai tengah (*median*), dan simpangan baku (*standard deviation*) dari masing-masing jawaban responden. Kemudian, analisis inferensial untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda, dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X_3 = Sistem Pelaporan Keuangan

e = Standar Error

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a) Hasil Uji Validitas instrumen

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur apakah setiap instrumen penelitian valid sebagai indikator variabel yang diteliti. Hasil uji validitas instrumen dari 28 indikator disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1.	Kapasitas Sumber Daya Manusia	X1.1	0,681	Valid
		X1.2	0,703	Valid
		X1.3	0,651	Valid
		X1.4	0,668	Valid
		X1.5	0,700	Valid
		X1.6	0,593	Valid
		X1.7	0,470	Valid
		X1.8	0,509	Valid
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran	X2.1	0,677	Valid
		X2.2	0,781	Valid
		X2.3	0,761	Valid
		X2.4	0,771	Valid
		X2.5	0,583	Valid

		X2.6	0,650	Valid
3.	Sistem Pelaporan Keuangan	X3.1	0,733	Valid
		X3.2	0,733	Valid
		X3.3	0,634	Valid
		X3.4	0,694	Valid
		X3.5	0,615	Valid
		X3.6	0,571	Valid
4.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Y1.1	0,779	Valid
		Y1.2	0,780	Valid
		Y1.3	0,551	Valid
		Y1.4	0,643	Valid
		Y1.5	0,814	Valid
		Y1.6	0,810	Valid
		Y1.7	0,631	Valid
		Y1.8	0,809	Valid

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa keseluruhan indikator yang digunakan memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,3, artinya keseluruhan indikator yang digunakan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

b) Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar keandalan instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,765	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,793	Reliabel
Sistem Pelaporan Keuangan	0,722	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,875	Reliabel

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan seluruh instrumen penelitian dikatakan reliabel, karena nilai keseluruhan *cronbach's alpha* $\geq 0,6$, artinya pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama pada waktu yang berbeda.

Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil pengujian antara tingkat signifikansi yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan tingkat *alpha* yang

digunakan. Data dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp.sig>alpha*, Hasil Pengujian dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Hasil Uji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,27727361
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,805
Asymp. Sig. (2-tailed)		,536

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normalitas

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* > $\alpha = 0,05$, dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang digunakan dalam persamaan regresi merupakan data yang terdistribusi dengan normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Hasil Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
1.	Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,450	2,222
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,220	4,539
3.	Sistem Pelaporan Keuangan	0,275	3,636

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan varian. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan model *glejser*, dengan syarat nilai signifikansi berada di atas 0,05 yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,074	Bebas heteroskedastisitas.
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,146	Bebas heteroskedastisitas.
3.	Sistem Pelaporan Keuangan	0,108	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 memperlihatkan tingkat signifikansi tiap variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain: nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan simpangan baku dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Hasil Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	8,00	20,00	13,3167	2,72771
X2	60	6,00	13,00	8,8500	2,27607
X3	60	6,00	13,00	8,5333	2,20528
Y	60	8,00	16,00	11,1833	2,83735
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti, dideskripsikan sebagai berikut:

- (1) Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai minimum sebesar 8,00 nilai maksimum 20,00 nilai rata-rata 13,3167 dengan simpangan baku sebesar 2,72771
- (2) Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai minimum sebesar 6,00 nilai maksimum 13,00 nilai rata-rata 8,8500 dengan simpangan baku sebesar 2,27607
- (3) Variabel Sistem Pelaporan Keuangan memiliki nilai minimum sebesar 6,00 nilai maksimum 13,00 nilai rata-rata 8,5333 dengan simpangan baku sebesar 2,20528
- (4) Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai minimum sebesar 8,00 nilai maksimum 16,00 nilai rata-rata 11,1833 dengan simpangan baku sebesar 2,83735

Uji Kelayakan Model digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis pengujian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat probabilitas yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Apabila signifikansi pada Tabel *anova* lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka layak digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa $\text{sig.F} = 0,000$ lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan Keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model menerangkan variasi variabel bebas. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,786, artinya 78,6 persen variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar dapat dijelaskan oleh variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 21,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji-t

No	Variabel	t_{hitung}	Signifikansi
1.	Kapasitas Sumber Daya Manusia	2,743	0,008
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran	3,657	0,001
3.	Sistem Pelaporan Keuangan	2,200	0,032

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

- 1) Uji hipotesis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 2,743 dengan nilai signifikansi $0,008 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar.

- 2) Uji hipotesis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 3,657 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar.

- 3) Uji hipotesis pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji t hitung diperoleh nilai t variabel Sistem Pelaporan Keuangan sebesar 2,200 dengan nilai signifikansi $0,032 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar.

Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka digunakan analisis statistik regresi linier berganda, t -test dan F -test. Hasil dari analisis disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t -test	Sig. T
Kapasitas Sumber daya Manusia	0,256	2,743	0,008
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,584	3,657	0,001
Sistem Pelaporan Keuangan	0,325	2,200	0,032
Konstanta	2,661		
R	0,893		
<i>Adjusted R square</i>	0,786		
F hitung	73,447		
F sig	0,000		

Sumber: Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai koefisien regresi dari variabel bebas kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan, variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa dan konstanta, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,661 + 0,256 (X_1) + 0,584 (X_2) + 0,325 (X_3) + 1,837$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka variabel kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.

Besarnya nilai konstanta yaitu 2,661 mengandung arti jika variabel, Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1), (Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2), dan Sistem Pelaporan Keuangan (X_3) konstan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 2,661

- 1) $\beta_1 = 0,256$ berarti apabila variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) baik, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kota Denpasar sebesar 0,256, dengan asumsi variabel bebas dianggap konstan.
- 2) $\beta_2 = 0,584$ berarti apabila variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) jelas sarasannya, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kota Denpasar sebesar 0,584, dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan.
- 3) $\beta_3 = 0,325$ berarti apabila variabel Sistem Pelaporan Keuangan (X_3) kualitasnya baik sesuai dengan Standar Akuntansi dan peraturan yang berlaku, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kota Denpasar sebesar 0,325 dengan asumsi variabel bebas yang dianggap konstan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijelaskan berikut ini.

1) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya semakin baik kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar akan semakin baik. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zuliarti, 2012, yang menyatakan apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik. Hasil penelitian ini juga mendukung teori *stewardship* yang menjelaskan tentang penatalayanan yang baik dipemerintahan. Pemerintah desa selaku *steward* memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat (*principal*) harus memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan jawaban kuesioner, responden kurang mendapatkan pelatihan untuk menunjang kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan belum memahami sistem akuntansi keuangan Desa dan Akuntabilitas Dana Desa.

2) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sararan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya semakin jelas sasaran anggaran yang ingin dicapai, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilowati (2014) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Surakarta. Anjarwati (2012) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung Teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa pemerintah termotivasi untuk mencapai kepentingan suatu organisasi.

Pemerintah desa selaku *steward* yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat, harus menentukan sasaran anggaran secara jelas dan tegas, agar tujuan organisasi dalam pengelolaan dana desa bisa dicapai dengan baik. Dalam Kejelasan Sasaran Anggaran responden belum mengetahui secara jelas *outcome* yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan.

3) Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya apabila Sistem Pelaporan Keuangan baik yaitu sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar akan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung Teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa pemerintah bekerja untuk membangun kepuasan, guna mencapai kesuksesan tertinggi organisasi. Pemerintah desa selaku *steward* yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat, berkewajiban memberikan informasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kewajiban tersebut akan bisa terwujud, jika pemerintah desa memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Responden penelitian mengatakan Sistem Pelaporan Keuangan Dana Desa belum sepenuhnya dilakukan, karena pegawai belum memahami dengan baik Sistem Akuntansi Keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya semakin baik kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar akan semakin baik
2. Kejelasan Sararan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya semakin jelas sasaran anggaran yang ingin dicapai, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kota Denpasar.
3. Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Artinya apabila Sistem Pelaporan Keuangan baik yaitu sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar akan semakin baik, transparan dan akuntabel.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa di Kota Denpasar harus lebih banyak memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. enyusunan anggaran berbasis kinerja pada Pmerintahan Desa, harus secara jelas menyatakan *input*, *output*, dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan, sehingga pegawai tahu apa yang harus dicapai dan dikerjakan.

P

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
 Bastian, Indra. 2011. *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.

- Ghozali, Iman. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kenis. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review* Vol. LIV No. 4. pp 707.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. Jhon Setyawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 513.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. Hal. 646.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, Harini. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta). *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 4 ayat (3) Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Radar Bali. 10 Agustus 2015. Desa Bingung Kelola Dana Besar.
- Wirawan, Nata. 2014. Cara Mudah Memahami Statistik 2 (*Statistik Inferensia untu Ekonomi dan Bisnis*). Edisi Ketiga. Denpasar: Keraras Emas. Hal. 244.
- Zuliarti. 2012. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemda Kudus: FE UMK.